repository.ub.ac.id

RINGKASAN

DWI PUJI ASTUTI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2013, Implementasi Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Crime* Berkaitan Dengan Penjualan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Dr. Sri Lestariningsih, S.H., MHum, Yuliati, S.H., LLM.

Sistem perdagangan yang semakin modern dan kompleks membuat persoalan perlindungan konsumen juga semakin kompleks. Keterkaitan dan ketergantungan antara konsumen dengan pelaku usaha kemungkinan kecurangan dapat terjadi. Seperti kasus kejahatan melalui internet yang pernah ditangani Polda Jatim, yaitu penipuan dengan menawarkan peralatan motor melalui *facebook*. Perilaku pelaku usaha tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 16 UUPK dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Pentingnya peran serta Polri dalam melindungi hak-hak konsumen dengan membantu mensosialisasikan produk hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen, merazia, mengawasi, dan menangkap para pelaku usaha yang tidak memperhatikan perjanjian pesanan barang/jasa antara pelaku usaha dan konsumen khususnya melalui media internet.

Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana bentuk implementasi, kendala dan upaya penyidikan tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu mengkaji UU yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan keberadaan objek penelitian diPolda Jatim, dilanjutkan identifikasi masalah sehingga dapat disimpulkan penyelesaian masalahnya. Jenis data terdiri dari data primer yaitu data langsung dari Polda Jatim dan data sekunder melalui bahan kepustakaan, internet serta dokumentasi. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini yaitu Kanit Ekonomi Bidang Perlindungan Konsumen dan Kanit *cyber crime*. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk implementasi penyidikan oleh Polda Jatim sebagai bentuk tindakan preventif yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi dan sebagai bentuk tindakan represif, setelah cukup bukti pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka penyidik segera melakukan proses penindakan. Proses penindakan disertai dengan penangkapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Implementasi penyidikan dapat dinyatakan belum optimal karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polda Jatim. Kendala yang harus dihadapi oleh penyidik Polda Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana *cyber crime* berkaitan dengan penjualan barang yang tidak sesuai perjanjian dalam rangka perlindungan konsumen yaitu Kendala Internal dan eksternal. Upaya penyidik Polda Jatim dalam menanggulangi kendala tersebut yaitu Upaya solusi dalam menghadapi kendala internal dan eksternal. Saran yang diberikan yaitu dapat secara intensif kerjasama dengan berbagai instansi untuk melakukan sosialisasi, menambah jumlah SDM penyidik polda, dan memberikan pendidikan khusus *cyber* pada penyidik polda.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA